

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa penanganan rehabilitasi untuk gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dan bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya masih dikatakan belum maksimal yang dapat dilihat dari:

1. Adanya ketidakjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang akan di implementasikan, para pelaksana mempunyai interpretasi yang salah dengan informasi yang diberikan dari awal maka hal tersebut mengakibatkan para pelaksana rehabilitasi mempunyai masalah dalam memulai kebijakan baru yaitu ketentuan teknis tersebut yang selalu berkembang menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Selain itu kurangnya konsensus tentang tujuan program tersebut, artinya para pelaksana masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda tentang program dan pencapaian tujuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai penyampaian program dan pencapaian tujuan program tersebut belum tersampaikan dengan jelas.
2. Dilihat dari faktor yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan, khususnya program rehabilitasi bagi gelandangan, faktor sumber daya di

BRSBK serta fasilitas fisik pun kurang memadai sangat menghambat dalam hal peningkatan partisipasi warga binaan untuk melaksanakan program rehabilitasi pada khususnya bimbingan keterampilan. Sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas fisik yang berupa sarana dan prasarana atau alat yang mendukung kinerja manusia tersebut sepenuhnya kurang maksimal, termasuk dengan wisma para warga binaan. Masalah ini dapat terlihat dari adanya gedung untuk keterampilan yang belum memadai, alat-alat teknis yang masih sangat minim, dan juga wisma untuk para warga binaan yang dirasa sangat kurang.

3. Intensitas para pelaksana yang lebih memilih menerima terhadap program yang sudah ditentukan dan pekerja sosial yang belum memberikan pelayanan rehabilitasi dengan baik dan apa yang diberikan oleh mereka belum maksimal karena pelayanan yang dilakukan oleh kepala seksi rehabilitasi sosial, pekerja sosial, dan pengelola bimbingan sosial ini memunculkan sikap yang mendukung program.
4. Struktur birokrasi yang ada di BRSBK tidak dimengerti dan membuat pelaksanaan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik dan benar. Kepala balai yang hanya menyerahkan pengurusannya kepada kepala seksi rehabilitasi sosial dan dapat disimpulkan para pelaksana belum benar-benar mengerti mengenai prosedur apa yang harus dilakukan dengan pelaksanaan rehabilitasi.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan di lapangan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik beberapa saran yaitu:

1. Petugas di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dalam memberikan pelayanan dan bimbingan terhadap warga binaan agar jumlah tenaga ahli profesional bidang pekerja sosial dapat ditambahkan lagi. Selain itu alokasi dana operasional sebaiknya juga untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai yang dirasa belum terpenuhi. Serta diharapkan lebih meningkatkan keragaman keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya agar warga binaan mempunyai bekal keterampilan yang lebih memadai dan berguna.
2. Pelaksanaan program harus menyeragamkan di dalam ketentuan teknis mengenai kegiatan rehabilitasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan agar sesuai dengan keadaan warga binaan.
3. Pelatihan dan bimbingan yang diberikan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya ini harus dijadikan motivasi bagi warga binaan untuk lepas dari masalah sosial yang dialami.
4. Partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan dalam kegiatan rehabilitasi gelandangan yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya, karena dalam upaya tersebut tidak hanya tugas dari dinas-dinas pemerintahan saja, namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat agar

upaya rehabilitasi yang diberikan kepada warga binaan dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Abdul Wahab, S. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Akhmad, F. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Andy Al Fatih, *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. UNPAD PRESS, 2010.
- Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quaterly Inc, 1980.
- Hasan, I. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghaia Indonesia, 2002.
- Indiahono, D. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Quinn Patton, M. *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. Beverily Hills: Sage Publications, 1987.
- Ripley, R.B. *Policy Analysis in Potical Science*. Chicago: Nelson Hall Publisher, 1985.
- Silalahi, U. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budyana, 1999.

Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama, 2012.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.

T. Keban, Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2008.

Widodo, J. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Terhadap Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Jurnal

B.D. Zefianningsih, B. Wibhawa, H.A. Rachim, 'Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi' *Jurnal Administrasi Negara*, 3 (2010): 2.

Studi Dokumen

Perjanjian Kinerja Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Tahun 2016

Buku dan Arsip Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya

Arsip Jumlah PMKS Dinas Sosial Kota Bnadung Tahun 2016

Dokumen dan catatan peneliti selama penelitian

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 19 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keberhasilan, dan Keindahan

Sumber dari Internet

<http://www.nova.edu/sss/QR/QR3-2/tellis1.html> diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 14.00